

**MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PRESFEKTIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Mohammad Fijar Rahmanto

NIM. 122111020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2017

**MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

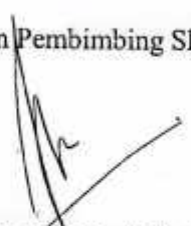
Mohammad Fajar Rahmanto

122111920

Sukoharjo, 12 Juli 2017

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP : 196401191994031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MOHAMMMAD FIJAR RAHMANTO

NIM : 122111020

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PRESFEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO** Adalah benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari di ketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Sukoharjo, 12 Juli 2017



Mohammad Fajar Rahmanto

H. Masrukhin, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Mohammad Fijar Rahmanto

Kepada

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara :

NAMA : MOHAMMAD FIJAR RAHMANTO

NIM : 122111020

**JUDUL : MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2013 KABUPATEN SUKOHARJO**

Sudah dapat dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (*mu'ammalah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqashahkan dalam waktu dekat. Demikian , atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12Juli 2017

Distujui Oleh Pembimbing

H. Masrukhin, S.H.,M.H.
NIP : 196401191994031001

PENGESAHAN

**MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PRESFEKTIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO**

Disusun oleh :

Mohammad Fijar Rahmanto

NIM.122111020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari rabu 19 Juli 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'ammalah*)

Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP : 19750825 200312 1 001

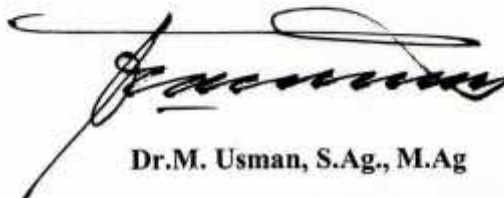
Penguji II



Sidik, S.Ag, M.Ag

NIP : 19760120 200003 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr.M. Usman, S.Ag., M.Ag

NIP : 19681227 199803 1 003

MOTTO

To think the earth to land down the thought

Memikirkan bumi dan membumikan pikiran (mapala specta)

Seseorang tidak berhak mendapatkan yang besar jika ia tidak peduli pada yang kecil (B.J. Habibie)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikina yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul kamu orang yang beriman (al-a'raf:85)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk ibunda ku tercinta dan ayah. Adikku Zia, Norma, Amar yang selalu ada di setiap kakak butuh kalian dan mengertikan kakak, tentang keluarga. Tidak lupa teruntuk mak Sutri tercinta dan pak Joyo sabar, untuk kasih sayangmu kepada aku dan adik adikku. Semoga skripsi ini menjadi awal dari kebahagiaan yang kupersembahkan untuk kalian. Dan takkan terlupakan sahabat-sahabatku yang selalu ada dikala apapun, di waktu perkuliahan Jito Jiyanto, Ahmad Jamaluddin, dan anak-anak kost pak Teguh yg telah menemaniku selama bertahun-tahun. Tidak akan terlupakan kenangan bersama kalian teman-teman mapala SPECTA yang telah menerimaku menjadi keluarga kalian. Kenangan indah dan suka duka yang kita jalani takkan pernah terlupakan. Puji syukurku kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-MU. Juga teruntuk teman-teman mu'amalah angkatan 2012 terima kasih untuk kesabaran kalian. Untuk almamater tercinta IAIN Surakarta tanpamu skripsi ini tak kan ada dan tidak memiliki arti apapun. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu dan memberi motivasi sehingga skripsi terselesaikan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PRESFEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO** tepat waktu. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya selama penulisan skripsi ini dibuat, terutama kepada :

1. Dr. Mudhofir abdullah S.Ag, M.Ag, M.Pd, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. M. Usman S.Ag, M.Hum. selaku Dekan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'malah).
4. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku wali studi sekaligus pembimbing skripsi yang telah mendampingi dan memberikan pengarahan yang bermanfaat selama menempuh masa studi sampai selesai studi, dan memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen dan Staff IAIN Surakarta yang telah memberikan berbagai pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Bapak Didik selaku pegawai Dinas Lingkungan hidup sukoharjo yang telah memberikan banyak penjelasan tentang penelitian yang saya lakukan.
7. Ibu Harjanti selaku pegawai Dinas Lingkungan hidup sukoharjo yang telah memberikan banyak berkas yang saya perlukan dalam penelitian
8. Untuk segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terima kasih banyak atas kemudahan informasi yang diberikan
9. Ibu dan Bapakku tersayang terima kasih atas segala-galanya, adik-adikku tercinta semoga kakak bisa cepat bahagiakan kalian.
10. Sahabat-sahabat terkenang Jamal, Jito Jiyanto, semoga kalian cepat menyusul.

11. Teman-teman kost Pak Teguh, yang menemani perjalan kisahku selama 4 tahun, Saiful Mukminin, Mutohar Ahmad (subangisme), Arroyan (seniman yang nakal telat), Ahmad Fauzi (kalem laknat), dan mereka yang selalu membuat canda tawa.
12. Yang tidak terlupakan teman-teman MAPALA SPECTA, Telmi, Suneo, Mbolor, Bocang, Gagu, Penceng, Gedho, Thegek, Cothot, Lelet dan lain-lain yang tak tersebut maaf ya.

Akhirnya berkat mereka skripsi ini terselesaikan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis sangat memohon maaf atas segala kekurangan itu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bidang keilmuan terutama hukum ekonomi syariah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 juli 2017

Penulis

Mohammad Fijar Rahmanto

ABSTRACT

MOHAMMAD FIJAR RAHMANTO, (122111020), Mekanisme Pelaksanaan Sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya Penegakan Hukum Lingkungan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini suatu bentuk kepedulian peneliti terhadap hukum yang semestinya hukum dibentuk untuk dijalankan. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum lingkungan karena hukum lingkungan merupakan aspek penting bagi masyarakat dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi oleh dinas lingkungan hidup dalam upaya penegakan hukum lingkungan presfektif peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo?

Penelitian ini bersifat kualitatif lapangan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dan menggunakan sumber data dua jenis yaitu primer dan sekunder, sumber data primer yang dipergunakan adalah hasil wawancara pada pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Data sekunder yang dipergunakan adalah buku, laporan -laporan dinas lingkungan hidup, dan skripsi terdahulu yang terkait erat dengan penelitian tentang teori hukum dan penegakannya terutama. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan dinas lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan sanksi apakah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, akan tetapi dalam upaya penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya dengan sanksi administrasi ringan. Melihat kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan semestinya sanksi administrasi terberat bisa menjadi senjata bagi aparat pemerintah dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Keyword: upaya penegakan hukum lingkungan

ABSTRACT

MOHAMMAD FIJAR RAHMANTO, (122111020), Sanction Implementation Mechanism by the Environment Agency in Enforcement of Environmental Law at Local Regulation Number 6 Year 2013 Sukoharjo District.

This research is a form of researcher's concern about the law that law should be in form to run. In this study discusses the environmental law because environmental law is an important aspect for the community in the fulfillment of the right to the environment. The formulation of the problem in this study is how the mechanism of implementation of sanctions by the environmental agency in the enforcement of environmental law efforts presfektif regional regulation number 6 of 2013 Sukoharjo District?

This research is qualitative field using empirical juridical research type, using qualitative descriptive analysis approach, and using two primary data source that is primary and secondary, primary data source which in use is result of interview to employee at Dinoh Environment of Sukoharjo Regency. Secondary data used are books, environmental department reports, and previous theses that are closely related to research on legal theory and its enforcement. The purpose of this research is to know how the mechanism that is done by the environment office of Sukoharjo Regency in implementing the sanction is in accordance with the applicable local regulation.

The result of this study concludes that the implementation of sanctions implemented by Sukoharjo District Environmental Office is not fully in accordance with the applicable local regulations, but in enforcement of environmental law is not enough only with light administrative sanctions. Seeing the increasingly worrisome environmental conditions should be the toughest administrative sanctions can be a weapon for government officials in enforcement of environmental law.

Keyword: environmental law enforcement efforts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15

a. Metode Wawancara.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika.....	16
BAB II PERATURAN DAERAH SEBAGAI HUKUM DAN UPAYA PENEG-	
AKAN HUKUM.....	18
A. Fungsi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum	18
B. Definisi Sanksi Dalam Hukum Lingkungan.....	25
BAB III PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SU-	
KOHARJO	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo.....	38
1. Letak geografis.....	38
A. Permasalahan dan Isu Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo.....	40
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	42
C. Prosedur Pemberian dan Pelaksanaan Sanksi.....	49
BAB IV ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS	
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNG-	
AN PRESFEKTIF PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2013 KABUPATEN	
SUKOHARJO.....	53
A. Analisis Pelaksanaan Sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
Sukoharjo.....	53
B. Tinjauan Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Kabupaten	
Sukoharjo.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Masyarakat sekitar sering melupakan tentang bagaimana kondisi lingkungan sekitar masih layakkah atau sudah tidak layak dikatakan lingkungan yang sehat. Negara ini memiliki aturan tentang hukum lingkungan dan masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam memiliki pedoman Al-quran dan Hadis yang di situ menerangkan juga tentang berbagai cara memakai lingkungan dengan semestinya. Dalam hal ini masyarakat belum banyak andil dalam hal pengawasan lingkungan dan pemeliharannya.

Permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita sudah menjadi permasalahan yang umum yang sampai saat ini belum mencapai titik temu dalam pemecahan permasalahannya. Berdasarkan UU No.32 tahun 2009, dan PP No.27 tahun 1999 tentang AMDAL, yang telah mengatur tentang hal tersebut tentang segala sesuatu yang berkaitan langsung tentang lingkungan hidup tentang tata cara pengelolaan dan pemeliharannya dan berbagai macam prosedur dalam pengelolaannya.

Dunia pendidikan umum sudah banyak menerangkan bagaimana cara pengelolaan sampah organik maupun non organik. Tetapi dalam kenyataannya praktek di lingkungan ataupun masyarakat masih dikatakan jauh dari harapan

¹ Dardiri Hasyim, *Hukum Lingkungan*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), hlm. 1.

dalam penciptaan lingkungan yang sehat. Dalam hal ini tokoh masyarakat pun kurang maksimal dalam pemberian pengertian tentang bagaimana manusia menghargai dan merawat sesama makhluk Tuhan. Bukan hanya sekedar menikmatinya saja, tapi kita juga perlu merawatnya. Aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah cukup jelas, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat sadar hukum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-qur'an dan beberapa hadist juga menjelaskan bahwasannya Sang Pencipta sangat membenci perusakan terhadap ciptaan-NYA. Karena semua yang ada sekarang semestinya terjaga untuk generasi berikutnya.

Krisis lingkungan global, merupakan krisis yang sebab-sebabnya bersifat difusi atau menyebar dan efek-efeknya bersifat universal. Dari titik titik ekonomi, misalnya, krisis global sangat berbeda dengan krisis lokal. Dalam krisis lokal, polusi udara, kemacetan lalu lintas, atau erosi lapisan subur tanah, dan para pelakunya secara langsung bertanggung jawab pada kerusakan yang menimpa para korban lokal. Namun dalam krisis global pelakunya terkadang tidak nampak dan hanya sebuah model atau ideologi pembangunan yang mencemari seluruh benua dan korbannya bisa menyeret di benua lain melalui gaya hidup lain. Pemanasan global misalnya adalah akibat penebangan hutan, industrialisasi yang tidak ramah lingkungan, dan penciptaan teknologi transportasi. Meski mereka dilakukan di tempat yang bemil-mil jaraknya, namun dapat menyebabkan hujan

asam ditempat lain, dan dapat memengaruhi perubahan iklim yang dampaknya bersifat global dan universal.²

Krisis lingkungan terjadi karena perilaku manusia dipengaruhi oleh cara pandang yang antroposentris. Perilaku manusia yang eksploitatif dan destruktif dan tidak peduli terhadap alam, berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia. Cara pandang seperti itu melahirkan manusia yang rakus, yang mengambil segala sesuatu dari alam tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian. Etika lingkungan hidup adalah bagaimana manusia bersikap terhadap semua makhluk hidup biotik dan abiotik, atau bagaimana manusia bersikap terhadap seluruh alam semesta.³

Isu-isu tentang lingkungan hidup terus mengalami perhatian yang semakin luas. Kesadaran akan perlunya tindakan global untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan lingkungan telah menjadi agenda bersama semua bangsa. Musibah pencemaran udara dan air bukan hanya akan menimpa satu bangsa atau negara, tetapi juga akan menimpa negara tetangga sekitar. Hujan asam akan menyebar melampaui batas-batas negara. Kebakaran hutan di pedalaman Kalimantan nyatanya juga mengganggu jalur laut dan udara, bahkan darat, yang juga pada akhirnya mengganggu negara tetangga sekitar. Polusi udara di kota memaksa orang membangun villa di daerah dataran tinggi, yang pada gilirannya akan merusak sumber mata air di pegunungan dan kembali mengganggu banyak orang. Agama-agama besar dunia sejak Deklarasi Stockholm pada Juni 1972 juga

² Mudofir Abdullah, *Masail Al-fiqhiyyah Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 76.

³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 12.

diarahkan untuk membantu menopang kesadaran konservasi lingkungan. Hal ini juga mampu untuk memperkaya nilai-nilai keislaman tentang pentingnya kesinambungan ekologi. Menyelamatkan bumi hanya mungkin dilakukan jika tatapan-tatapan spiritual dan moral agama dikedepankan dan bukannya filsafat sekuler yang hedonistis.⁴

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (HLHBS) sebagai hak asasi manusia (HAM) di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Piagam hak asasi manusia (bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia), pasal 28 berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUPH (undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur berbagai hak, kewajiban, dan larangan atas lingkungan hidup.⁵ Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 65 sampai dengan 69, dalam Undang-Undang ini diatur tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan (pasal 3).

Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan yang sangat rawan akan terjadinya tindak pencemaran lingkungan hidup. Kawasan industri tumbuh subur di Kabupaten Sukoharjo, bersamaan dengan itu para pekerja pendatang dari luar kota maupun dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Sukoharjo

⁴ Muhammad Qorib, *Konservasi Lingkungan Dalam Pendekatan Tasawuf*, Dinika Journal of Islamic Studies Vol.7, No 1, Januari 2009, Sukoharjo, h.16.

⁵ *Ibid*, h. 5.

berdatangan. Hal ini menuntut kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terkadang mendatangkan resiko, sarana dan prasarana yang belum memadai. Pengawasan terhadap pengelolaan hasil limbah dari masyarakat yang belum dipersiapkan membuat masyarakat membuang sampah maupun limbah disembarang tempat.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dalam Peraturan Daerah terdapat perihal yang mengatur sanksi bagi pelanggar. Sanksi yang tertera seharusnya membuat masyarakat patuh dengan aturan yang telah diberlakukan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo yang diberi amanah dari Bupati terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah sukoharjo. Wewenang dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang di miliki DLH seharusnya jika dilaksanakan cukup membuat efek jera bagi masyarakat di lingkungan Sukoharjo. Kemungkinan palaksanaan mekanisme pemberian sanksi yang dilakukan DLH belum begitu sesuai sehingga masih terdapat banyak tindak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sudah semestinya hukum ditegakkan demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, masih kurang maksimalnya peraturan ini berlaku di masyarakat secara optimal terbukti dengan banyaknya pencemaran berupa sampah rumah tangga maupun sampah usaha kecil menengah yang kadang terbengkalai tidak sesuai di mana harus ditempatkan. Sampah yang menumpuk menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini termasuk dalam pencemaran lingkungan meskipun dalam skala kecil namun apabila ini tidak

dicegah sedari sekarang sangat memungkinan akan memunculkan permasalahan lingkungan suatu saat.

Sampah satu permasalahan yang sering diremehkan bagi masyarakat kita. Sampah dianggap sesuatu yang tidak berguna lagi dan bisa dibuang kapanpun di manapun juga, apalagi bagi sebagian masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di tepian sungai, bisa dipastikan sungai akan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah.⁶

Larangan bagi setiap orang terhadap lingkungan tertera dalam perda Kabupaten Sukoharjo antara lain : melakukan pembuangan air limbah ke media lingkungan melampui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pembuangan sampah atau limbah padat dan/atau produk olahan atau usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan ke sumber sumber air dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah, melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya dilingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak, membuang sampah atau kotoran di sungai, saluran, gang-gang, got, jalan umum atau di tempat umum kecuali tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.⁷

Persoalan lingkungan lambat laun akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan jika tidak ditangani sedari dini. Upaya pembentukan moral

⁶ M. Thalbah, Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi menjaga Bumi memahami makna Kitab Suci*, (Yogyakarta: total media, 2008), h. 296.

⁷ Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 56

masyarakat melalui undang-undang semestinya terlaksana dengan baik bukan saja menjadi daftar yang dibukukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, persoalan yang hendak dikaji lebih jauh adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi hukum lingkungan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam upaya penegakan hukum lingkungan ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, tujuannya yaitu:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan sanksi hukum lingkungan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui implementasi dinas lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum lingkungan. Selain itu dapat berguna sebagai bahan kajian dalam pengembangan hukum lingkungan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

E. Kerangka Teori

Suatu aturan dibentuk untuk menjadi suatu kontrol dalam masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, yang mana dalam suatu peraturan dibentuk pasti ada kewajiban dan hak. Dalam hal ini bersifat umum, semua bagian dari masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraannya. Jika suatu peraturan dilanggar pasti muncul suatu konsekuensi yang diambil. Dalam hal ini jika seseorang mencemari lingkungan dan dikenai sanksi yang cukup berat maka untuk berikutnya akan muncul efek jera dalam masyarakat untuk tidak melakukan atau mengulangi hal tersebut. Dalam hal ini perlu kontrol dan pengawasan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat yang berkewajiban menindak lanjuti suatu pelanggaran aturan yang telah dibentuk.

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan, melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan

generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global, nasional, regional dan lokal.⁸

Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Agar terwujudnya lingkungan hidup yang layak sebagai hak atas lingkungan hidup yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin kurang tahunya masyarakat tentang sanksi yang terdapat dalam perda tentang hal pencemaran lingkungan atau memang masyarakat yang sudah tidak peduli dengan keseimbangan alam yang kiranya sangat dibutuhkan sampai kapanpun. Sanksi administratif yang memiliki putusan akhir yaitu pencabutan izin usaha maupun penutupan paksa usaha. Sanksi pidana yang memiliki wewenang untuk memenjarakan pelaku pencemar dengan lama kurungan tiga bulan dan denda 50 juta rupiah. Sanksi perdata yang bisa menimbulkan pelaku pencemaran membayar ganti rugi hingga puluhan juta bahkan ratusan juta. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini mempunyai wewenang dalam pelaksanaan perda yang telah diterapkan terkait lingkungan hidup di wilayah Sukoharjo. Bisa dibayangkan jika sampah yang semestinya dikelola dengan baik terbengkalai begitu saja yang akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri yang akan menimbulkan berbagai macam

⁸ Perda no.6 tahun 2013 kab. Sukoharjo, pasal 3

penyakit, kiranya akan merugikan diri sendiri ataupun generasi nanti. Masalah lingkungan hidup telah menjadi persoalan dalam kehidupan umat manusia, untuk itu perlu mendapatkan ketegasan dalam rangka mengupayakan kehidupan yang kondusif. Dakwah islamiyah juga seharusnya diarahkan, untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian integral di konsep kekhalifahan manusia di muka bumi ini secara utuh.⁹ Materi dakwah yang mengetengahkan pesan-pesan agama seperti pengertian dosa, maksiat, haram dan sejenisnya juga harus ditujukan kepada perusak lingkungan, demikian juga pengertian tentang pahala, amal jariyah, wajib dan sejenisnya. Harus disampaikan bagi orang yang *berikhtiyar* dan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Keberhasilan suatu proyek konservasi lingkungan, sesungguhnya sangat ditentukan pertama kali oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek inilah yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya.¹⁰

Islam berpandangan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di katagorikan sebagai *mafasid*/kerusakan yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu segala *ikhtiar* yang umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia. MUI (majelis ulama indonesia) mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan sampah pada tahun 2014 nomor 47 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa hukum mengelola sampah untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan adalah wajib

⁹ Dardiri Hasyim, *Hukum Lingkungan*, (Surakarta: sebelas maret university press,2004) h.122.

¹⁰ Mudofir Abdullah, *Masail ...*, h. 65.

kifayah dan hukum membuang sampah sembarangan *haram*. Harus dilakukandengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup penekanan terhadap orang yang beriman ialah orang yang tidak melakukan kerusakan di bumi.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Julia Silviana (Universitas bandar lampung 2016) yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung“ memperoleh hasil penelitian yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung.¹¹ Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan, yang dimaksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH) di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup, kemudiann kurangnya pengawasan baik pengawasan terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup maupun pengawasan langsung terhadap lokasi pencemaran tersebut, lemahnya koordinasi antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam hal ini kepolisian terhadap kasus pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di wilayah Pesisir Teluk Lampung.

¹¹ Julia Silviana, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung* ,<http://digilib.unila.ac.id/21334/> diakses 2 Agustus 2016

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Tegar Khaerul Huda (Universitas Negeri Semarang 2013) “penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan di kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan asas pencemar melakukan tindakan tertentu dan pemulihan fungsi lingkungan. Penghitungan menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum digunakan. Penerapan asas pencemar membayar di kota Semarang dinilai cukup efektif dalam menangani masalah pencemaran lingkungan.”¹²

Dalam penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Berlian Maharani, Mahasiswa UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) tahun 2011 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penelitian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Akibat Hukumnya” peneliti menyimpulkan bahwasannya fokus penelitian tertuju pada dokumen AMDAL dan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran.¹³ Terdapat penelitian skripsi terkait lingkungan hidup di pemerintahan Sukoharjo yang dilakukan Oleh Kartika Candrawati, Mahasiswa UNS tahun 2011 yang berjudul ”Kebijakan Pemerintah

¹² Tegar Khaerul Huda, *penerapan asas pencemar membayar (polluter pays principle) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan di kota Semarang* <http://lib.unnes.ac.id/18060/1/8150408167.pdf>,

¹³ Berlian Maharani, *Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penelitian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Akibat Hukumnya*, <https://digilibuns.ac.id/dokumen/detail/2304/Tanggung-Jawab-Lingkungan-Hidup-Kabupaten-Sukoharjo-Dalam-Penilaian-Dokumen-Analisis-Mengenai-Dampak-Lingkungan-Hidup-Dan-Akibat-Hukumnya>, di akses 2 Agustus 2016

Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana kebijakan pemerintah Sukoharjo terkait lingkungan hidup sesuai dengan UUPH tahun 2009.¹⁴

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sebelumnya adalah fokus penelitian ini tertuju pada mekanisme pelaksanaan sanksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo sesuai perda tahun 2013 nomor 6.

Dalam buku fiqh ekologi yang ditulis oleh M. Thalhah dan Achmad mufid menyatakan bahwa Agama sejak dini memerintahkan pemeluknya untuk hidup secara bersih, karena bagaimanapun juga kebersihan merupakan bentuk dari keindahan, sementara keindahan adalah sesuatu yang dicintai Tuhan. Namun begitu, kebersihan tidak hanya dimaknai sebagai aktifitas membuang kotoran, menjaga kotoran agar tidak mencemari lingkungan juga bentuk dari kebersihan bahkan nilainya lebih mulia di banding dengan sekedar membuang kotoran. Oleh sebab itu, kita semua harus mulai menyadari pentingnya tidak membuang sampah sembarangan disamping tugas pemerintah untuk mencari solusi bagi pendaaur ulangan limbah sampah.

Dalam konsep kemahklukan ini manusia memperoleh konsepsi dari maha pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama *al-intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkomsumsinya langsung maupun

¹⁴ Kartika Candrawati, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, [https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24004/NTA1Njk/Kebijakan-Pemerintah-Daerah-Kabupaten-Sukoharjo-Dalam Perlindungan dan Pengelolaan-Lingkungan-Hidup-abstrak.pdf](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24004/NTA1Njk/Kebijakan-Pemerintah-Daerah-Kabupaten-Sukoharjo-Dalam%20Perlindungan%20dan%20Pengelolaan-Lingkungan-Hidup-abstrak.pdf), diakses 2 Agustus 2016

dalam arti memproduksi. Kedua *al-i'tibar* (mangambil pelajaran), terhadap fenomena yang terjadi antara hubungan manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*islah*) maupun berakibat destruktif (*isfad*), *Intifa'* terhadap kekayaan alam yang tersedia.¹⁵ Sebagian besar negara-negara Islam adalah negara-negara yang sedang berkembang yang masih sibuk menghadapi gejolak politik, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan masalah ekonomi. Hal ini menyebabkan isu-isu lingkungan kurang memperoleh perhatian yang memadai atau masalah lingkungan hanya menjadi sekunder bagi kebijakan politik lokal.¹⁶

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yang berisi yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang peneliti lakukan bersifat penelitian hukum secara yuridis empiris¹⁷, peneliti melihat bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, yang di dalamnya meliputi pendekatan yang bersifat deskriptif analitis Dimulainya dengan pengumpulan fakta fakta sosial / fakta hukum, menggunakan instrumen penelitian (wawancara, observasi), analisa kualitatif¹⁸. Dan sebagai langkah penelitian ini peneliti melakukan penentuan wilayah yang akan di jadikan wilayah penelitian sebagai batasan objek dimana masyarakat nantinya yang akan diminta keterangan

¹⁵ Dardiri Hasyim, *Hukum ...* h. 113.

¹⁶ Mudofir Abdullah, *Masail ...*, h. 86.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 31.

¹⁸ DR.bahder johan nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008), h. 124.

perihal materi penelitian. Untuk berikutnya diambil kesimpulan dari hal tersebut sebagai bahan acuan pertimbangan untuk kedepannya

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan adalah Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara di dinas lingkungan hidup Sukoharjo dan masyarakat Sukoharjo, dan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain diantaranya jurnal, buku, laporan-laporan Dinas Lingkungan Hidup, skripsi terdahulu, yang terkait atau erat hubungannya dalam penelitian ini

¹⁹.

3. Teknik pengumpulan data

a. Metode wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah wawancara dengan sifat terbuka. Di mana responden bebas memberikan jawaban tanpa dibatasi dengan jawaban-jawaban yang telah ditentukan. Dalam wawancara ini yang diwawancarai adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012), h. 12.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.²⁰ Peneliti terlebih dahulu memberi gambaran umum tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, data-data tentang tindak pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo, dan analisis terkait kesesuaian mekanisme pelaksanaan sanksi dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

H. Sistematika

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul **MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PRESFEKTIF PERDA NO 6 TAHUN 2013 KABUPATEN SUKOHARJO** yaitu Bab 1 merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang di dalamnya terdapat keterangan keterangan yang mendukung untuk terealisasinya penelitan. Bab 2 yang membahas tentang pengertian sanksi peraturan daerah tentang undang-undang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo. Kewajiban masyarakat dalam memahami dan perilaku seharusnya masyarakat. Bab 3 membahas tentang situasi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.106

dan permasalahan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo Bab IV analisis yang berisi tentang gambaran umum penelitian, membahas mekanisme pemberian sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan di lapangan, sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2013, Bab V penutup yang berisi tentang muatan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran yang diperoleh dari hasil skripsi.

BAB II

PERATURAN DAERAH SEBAGAI HUKUM DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

A. Fungsi Hukum dan Upaya Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹ Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana, menjaga kelestariannya, tidak mencemari lingkungan, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Fungsi hukum dapat diuraikan dalam beberapa aspek tersebut² :

1. Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu
2. Hukum sebagai norma-norma abstrak
3. Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat
4. Hukum sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat

Menurut Hoebel dalam buku Marhaeni Ria Siombo, hukum bereksistensi supaya dapat mengendalikan perilaku manusia, sehingga berbagai perbedaan kepentingan tidak menjadi konflik terbuka. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri,

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 41.

² *Ibid.* h. 40.

Hukum lingkungan modern menerapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, dan demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.³ Hukum lingkungan merupakan norma atau aturan yang mengatur perbuatan atau perilaku, agar manusia bersikap arif dan bijaksana terhadap dengan bersama sama menjaga lingkungan dan kepatuhan hukum.⁴

Secara umum hukum dibagi menjadi dua golongan yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau hukum perdata mengatur kepentingan kepentingan perseorangan. Hukum perdata lazim dibagi empat yaitu⁵ :

1. Hukum tentang diri seseorang
2. Hukum kekeluargaan
3. Hukum kekayaan
4. Hukum kewarisan

hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya , mengatur hubungan kenegaraan dan alat-alat kelengkapannya. Hukum publik yang berkembang pada saat ini terdiri atas hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum internasional dan lainnya yang termasuk dalam definisi diatas. Dilihat dari definisi hukum publik, hukum lingkungan terdapat dalam wilayah hukum publik. Tetapi

³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* ,(Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1988), h. 11.

⁴ Teguh sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.163

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* , (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 45.

dalam perkembangannya, terdapat bagian bagian tertentu yang berada dalam wilayah hukum perdata, misalnya penyelesaian sengketa lingkungan yang berkaitan dengan hukum perdata, dengan bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup banyak berkaitan dengan ganti rugi, yang merupakan wilayah hukum perdata.

Drupsteen mengemukakan bahwa hukum lingkungan (*milleutecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*naturlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu⁶ :

1. Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan, (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang disesuaikan dengan lingkungan.
2. Hukum perlindungan lingkungan, tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999), h. 39.

dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

3. Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya adalah terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan hidup berakitan erat dengan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum lingkungan yang berlaku (*ius operatum*) dan meliputi pada tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidana atas segala kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya dalam penyelamatan lingkungan hidup teragantung pada kesadaran hukum, yakni pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat setempat, dan pihak pencemar.

Pandangan F.P.C.L Tonnaer tentang penegakan hukum dari belanda. Ia membedakan penegakan hukum menjadi tiga macam bentuk yaitu⁷ :

1. Penegakan hukum administratif (*administratief rechtelijke handhaving*) berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan. Dalam hubungan ini dapat diantaranya disebut dan ditetapkannya *dwangsom* (uang paksaan) oleh “B.en. W” (badan harian kota madya), atau pencabutan izin sebagai sanksi oleh *Ministerie Volkshuvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene* (VROM) yaitu

⁷ *Ibid*, h. 415.

kementrian yang ditugasi mengurus perumahan rakyat, penataan ruang dan kesehatan lingkungan.

2. Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksanaan norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului oleh penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
3. Penegakan hukum perdata terkait dengan tersedianya instrumen yuridis oleh hukum perdata kepada seseorang (termasuk pula pemerintahan dalam hal-hal tertentu) untuk digunakan dalam rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan. Disinipun hakim (hakim penegakan hukum perdata adalah hakim perdata) yang memberi keputusan , akan tetapi berbeda dengan dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata ini pihak-pihak mempunyai lebih banyak kebebasan untuk menentukan apakah akan menuju ke penegakan hukum (melalui pengadilan) atau tidak, karena dalam hukum perdata para pihak tidak terlalu terikat kepada prosedur dibanding dengan dalam hukum pidana.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasian hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalm kaidah-kaidah pandangan nilai yang mantap dan mengejawentahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mencitakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo, dalam buku Zaeni Asyadie memberikan pendapat bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya penegakan yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam

kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur yaitu⁸ :

1. Kemauan hukum
2. Tindakan para penegak hukum
3. Struktur penegakan hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan hidup sehari-hari.

Menurut Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah⁹:

1. Hukum itu sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat lingkungan dimana hukum itu diterapkan
5. Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas penegak hukum, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, penghargaan terhadap hukum, dan peningkatan

⁸ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), h.182'

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h.15.

kesadaran hukum.¹⁰ Masyarakat dalam hal ini harus bisa bekerja sama dengan aparatur pemerintahan dalam mewujudkan suatu hukum yang mendapat penghargaan, agar dapat terjadi suatu kesadaran hukum di masyarakat. Aparatur pemerintah diharuskan dalam hal terciptanya suatu hukum yang akan diterapkan memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum tersebut kepada masyarakat.

Ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum itu ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai, ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait, terutama segi undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.¹¹ Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40.

¹¹ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.186.

(*Sluitstuk*) dari penegakan hukum yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya menakutkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ketahap pemenuhan ketentuan peraturan¹². Hukum pidana lingkungan sebagai *ultimum remedium* merupakan terapi akhir dapat diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan dengan efektifitasnya tergantung kemampuan aparat penegak hukum dalam upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan asri untuk diwariskan pada anak cucu kelak.

B. Definisi Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan

Pencegahan dan penyelesaian persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat diatasi salah satunya dengan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut ada tiga macam, yakni sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana.¹³ Pengertian dari sanksi? Sanksi adalah cara cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum¹⁴. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Hampir semua studi ini membahas tentang pencegahan kejahatan atau tindakan tindakan tercela lainnya, seperti menyontek ketika ujian.

¹² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999), h. 376.

¹³ Dardiri Hasyim, *Hukum ...*, h. 217.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 93.

Teori apapun mengenai sanksi harus bertolak dari penerimaan terhadap fakta bahwa ancaman hukuman cenderung untuk mencegah, persis sama halnya imbalan cenderung untuk mendorong perilaku yang di imbal. Sebagai satu patokan umum, orang-orang selalu menginginkan hal yang menyenangkan dan memuaskan, dan mereka menghindari apa yang merugikan, hukuman, dan sakit¹⁵. Proposisi ini merupakan hal pokok bagi teori pembelajaran dan bagi studi mengenai perilaku manusia. Skeptisisme mengenai hukum legal muncul dari fakta bahwa dalam keadaan tertentu, jenis sanksi tertentu tidak menghasilkan banyak efek, namun demikian proposisi dasarnya tetap tidak terbantahkan. Efek pencegah dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagai populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi memodifikasi perilakunya sesuai hal itu. Pencegahan umum berbeda dengan pencegahan khusus yang, dari segi hukuman berarti kecenderungan untuk mengurainya atau menghilangkan tindak kejahatan pada waktu mendatang oleh orang yang tengah dihukum. Ide pencegahan umum berarti, misalnya, bahwa hukum tentang perampokan bersenjata akan membuat takut orang-orang sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan perampokan bersenjata karena takut ditangkap, didakwa, dipenjara : pencegahan khusus berarti bahwa seorang perampok yang telah dipenjarakan akan berpikir dua kali untuk merampok kembali¹⁶. Pencegahan tidak bermakna bahwa orang-orang mematuhi hukum karena merasa takut kepada hukuman tertentu secara

¹⁵ *Ibid*, h. 94

¹⁶ *Ibid*, h. 96.

langsung. Bisa kita maknai bahwa naiknya biaya sanksi, dan hukuman actual akan menghasilkan perilaku yang cenderung tidak melanggar dan lebih tercegah.

Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Pandangan demikian merupakan karakteristik pandangan kaum positivis. Menurut kaum positivis, unsur paksaan dikaitkandengan pengertian tentang hierarki perintah secara formal. Sejak adanya negara nasional, sepanjang sejarah ahli hukum mulai dari Thomas Hobbes melewati Austin sampai ke Hans Kelsen dan Somlo memandang esensi hukum dalam struktur piramida kekuasaan negara. Bahkan Hart sekalipun juga memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum. Perintah disertai ancaman digambarkan olehnya sebagai perintah yang dilontarkan oleh penodong kepada orang yang ditodong agar sitertodong menuruti kehendak penodong.¹⁷

Kontrol secara hukum, dengan demikian, juga bersifat umum. Hal ini oleh Hart disebut sebagai karakter hukum yang pertama. Bagi negara modern, merupakan suatu hal yang lumrah kalau aturan hukum yang berlaku bagi semua orang yang ada di wilayah itu. Perlu di kemukakan di sini, bahwa merupakan hal keliru menganalogikan perintah yang ditujukan untuk sekelompok orang dengan perintah dalam situasi tatap muka sebagaimana polisi memberhentikan pengendara mobil.

¹⁷ *Ibid*, h. 99

Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subjek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah yang bersifat menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis¹⁸. Adapun sanksi yang terdapat pada hukum lingkungan yang bersifat menghukum adalah :

1. Sanksi pidana

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2); Pasal 29 ayat (1); Pasal 30 ayat(1); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48, Pasal 55, Pasal 56 huruf a sampai dengan huruf h diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

¹⁸ *Ibid*, h. 101.

dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf i sampai dengan huruf l di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)¹⁹. Pada Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 41 ayat 1 undang-undang no.23 tahun 1997 tersebut terdiri dari 3 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Barang siapa
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan sengaja

Setiap unsur tindak pidana tersebut diatas harus dapat ditentukan fakta-fakta yang akan dijadikan wadahnya. Fakta-fakta tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah (yang ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku) oleh karena tersebut sebagai unsur yang merupakan akibat dari perbuatan harus dibuktikan, maka dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal 56 Perda no 6 tahun 2013 merupakan delik materiil untuk kepentingan praktis pencarian dan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang di perlukan, pencarian dan pengumpulan

¹⁹ Lihat BAB XV pasal 80, perda no 6 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kab. Sukoharjo

fakta-fakta terutama di lapangan atau TKP (tempat kejadian perkara) diarahkan kepada 7 komponen fakta yaitu²⁰ :

- a. Apa yang terjadi . Pencemaran air sungai, air laut, tanah, udara dan lain lain. Perusakna hutan lindungi, penangkapan fauna dan flora yang dilindungi, pemberian informasi dan keterangan palsu, pelakasanaan usaha (industri pertambangan, penangkapan ikan, dll) yang dilakukan tanpa izin dari pejabat instansi yang berwenang dts.
- b. Bilamana atau kapan periode jangka waktu kasus *tempo delicti*
- c. Dimana atau wilayah mana terjadinya kasus (buatkan pertanyaan jika mungkin ditentukan koordinatnya terutama bila terjadi diwilayah perairan pantai laut)*Locus delicti*
- d. Bagaimana proses atau riwayat kejadian secara kronologis *modus operandi*
- e. Siapa atau siapa-siapa saja pelaku atau yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut
- f. Gambaran fenomena atau fakta-fakta yang merupakan akibat dari terjadinya kasus selengkap mungkin sehingga mencakup. Bentuk bentuk korban yang timbul terhadap jiwa dan kesehatan manusia, flora, fauna serta lingkungan pada umumnya besarnya kerugian yang diderita, perincian kerugian dan pihak-pihak yang menderita kerugian.

²⁰Dardiri Hasyim, *Hukum ...*, h. 222.

g. Apa yang menjadi motif pelaku atau penanggung jawab terjadi kasus. Umumnya motif berkisar pada kepentingan/keuntungan finansial ekonomis.

Dari hasil pengumpulan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan pembuktian kelak dipengadilan. Adapun sanksi pidana penjara sesuai UUPLH tahun 2009 mulai dari²¹ : 1tahun, 3tahun, 6 tahun, 9tahun, 10tahun,dan 15tahun. Ancaman pidanan denda mulai dari Rp500jt sampai dengan Rp15milliar ancaman pidana denda ini dapat ditambahkan sepertiganya apabila diterapkan kepada badan hukum.

2. Sanksi administrasi

Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

²¹ UUPLH No 32 tahun 2009 BAB XV Ketentuan Pidana

a. Paksaan pemerintah (pasal 60 ayat 2-huruf b) berupa:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi
- 2) Pemindahan sarana produksi
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi
- 4) Perintah pembongkaran
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan / atau perusakan;
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan / atau perusakannya.

Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Bupati

berwenang memanggil pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan.²²

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintahan berbentuk tindakan atau perbuatan nyata (*faitelj handeling*). Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UUPH paksaan pemerintah dapat berupa

- Tindakan untuk mencegah pelanggaran
- Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran
- Tindakan untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan
- Tindakan penyelamatan
- Tindakan pemulihan, yang semua atas beban dan biaya penanggung jawab kegiatan dan usaha.²³

b. Uang paksa

Dalam pasal 25 ayat 5 UUPH, dikatakan : tindakan penyelamatan penangguhan dan atau pemulihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan yang demikian merupakan alternatif terhadap bentuk sanksi administrasi yang pertama berupa paksaan pemerintah.²⁴

c. Pencabutan izin usaha / atau kegiatan

²² Perda Nomor 6 Tahun 2013 pasal 60-65

²³ Dardiri hasyim, *Hukum ...*, h. 216.

²⁴ *Ibid*, h. 217.

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabutan untuk izin usaha atau kegiatan dalam perda nomor 6 tahun 2013 ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dia atur dalam pasal 60.

3. Sanksi perdata

Aspek hukum perdata tercakup di dalam beberapa ketentuan dalam undang undang no. 23 tahun 1997,yaitu yang meliputi :

a. Gugatan ganti rugi dan pertanggung jawaban mutlak (*strick liability*)

Pasal 34 mengatur tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Pasal 35 mengatur tentang diterapkannya sistem tanggung jawab mutlak atau lazim disebut sebagai *strick liability*

Dalam pasal 35 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam hal adanya ²⁵:

- Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
- Menggunakan bahan berbahaya dan beracun
- Dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun

Dalam dunia hukum dikenal dengan adanya lambang seorang dewi, yaitu Dewi iustitia dengan mata tertutup sambil memegang pedang ditangan kanannya dan timbangan ditangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau prestise seseorang yang dihadapkan

²⁵ *Ibid*, h. 218.

kepadanya. Semua hal itu sama di dalam hukum. Hal yang ditimbang oleh dewi iustitia adalah kesalahan orang itu dan apabila memang dijumpai kesalahan pada orang itu, dengan pedangnya sang dewi akan menghukumnya. Dengan demikian, lambang tersebut menyatakan bahwa tiada seorang pun berada di atas hukum. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan menjadi atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau gantirugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum, Misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Perkembangan persoalan yang timbul dalam masyarakat saat ini membuat kita semakin sulit menarik garis pemisah terhadap penggolongan wilayah hukum. Masyarakat yang dinamis ditambah dengan perkembangan teknologi modern membuat pendekatan hukum terhadap permasalahan lingkungan yang muncul di masyarakat, semakin sulit dipilah-pilah dalam penggolongan hukum publik, hukum perdata, maupun hukum pidana. Karena itu dalam kasus lingkungan hidup dilakukan pendekatan ilmu hukum yang berkaitan satu sama lain.²⁶

²⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 45.

Siti Sundari Rangkuti dalam buku teguh sulistia dan aria Zurnetti mengatakan telah meneliti masalah berbagai sanksi dalam hukum lingkungan dan telah mengemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut²⁷ :

1. Bagian terbesar dari hukum lingkungan adalah hukum administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perizinan hendaklah disempurnakan dengan memperhitungkan kepentingan ekologi demi pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Gugatan kerugian terhadap perusak lingkungan dapat diajukan ke pengadilan negeri mengenai perbuatan melawan hukum
4. Beban pembuktian sangat memberatkan penggugat yang biasanya awam dalam hukum, sehingga perlu dipikirkan kemungkinan penerapan “ sistem pembuktian terbalik” dalam perkara lingkungan.
5. Sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi hanya merupakan *ultimatum remedium*
6. Badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal perkara perusakan atau pencemaran lingkungan.
7. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam UUPH guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan.

²⁷ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 178.

8. Aparat polisi kepolisian sebagai penyidik perkara lingkungan hendaknya mampu menyajikan alat bukti yang kuat dan menyakinkan agar penegakan hukum dapat berhasil.
9. Sanksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerja sama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁸

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999). h 420.

BAB III

PERRMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

1. Letak Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi jawa tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah provinsi jawa tengah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis kabupaten sukoharjo terbentang pada posisi $110^{\circ} 42' 06.79''$ – $110^{\circ} 57' 33.70''$ bujur timur dan $7^{\circ} 32' 17.00''$ – $7^{\circ} 49' 32.00''$ lintang selatan. Kabupaten Sukoharjo secara geografis diapit oleh 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan batas-batas daerah yaitu¹ :

- a. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karangayar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Berikut gambar peta wilayah Kabupaten Sukoharjo tersaji dalam

gambar 1.1

¹ *Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kab. Sukoharjo tahun 2015*, h. 4.



Gambar peta administrasi kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo secara administrasi terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri atas 150 Desa dan 17 Kelurahan, dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendsari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 62,18 Km² (13 %) sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 19,23 Km² (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut ²:

² *Ibid*, h. 5.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase luas wilayah
1	Weru	41,98	9,00
2	Bulu	43,86	9,40
3	Tawang Sari	39,98	8,57
4	Sukoharjo	44,58	9,55
5	Nguter	54,88	11,76
6	Bendosari	52,99	11,36
S	Polokarto	62,18	13,32
8	Mojolaban	35,54	7,62
9	Grogol	30,00	6,43
10	Baki	21,97	4,71
11	Gatak	19,47	4,17
12	Kartasura	19,23	4,12
Total		466,66	100

Tabel 1.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2015 ,Sumber: BPS, Sukoharjo dalam rangka 2015

B. PERMASALAHAN DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO

Ada beberapa permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dalam Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo yaitu³ :

1. Pencemaran air karena adanya/banyaknya limbah cair yang dibuang ke perairan umum / badan sungai yang belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Contohnya di daerah Kartasura (Industri Tahu) yang membuang limbah pengolahan tahu ke sungai dan daerah Mojolaban (Industri *Ethanol*) yang membuang limbah hasil perajin *ethanol* tradisional ke saluran irigasi.

³ *Ibid*, h. 12.

2. Pencemaran limbah padat yang disebabkan oleh kegiatan manusia membuang sampah ke perairan umum. Contohnya disaluran irigasi daerah Langenharjo terdapat penumpukan sampah maupun sedimen padat yang mengakibatkan pendangkalan irigasi dan pencemaran irigasi.
3. Pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri, dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Adanya industri yang mengemisikan gas buang ke udara tanpa pengelolaan yang baik dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan menyebabkan peningkatan polusi udara yang signifikan. Kasus ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan tekstil.
4. Terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, karena pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi, sehingga mengakibatkan banjir, erosi dan lahan kritis. Hal ini terjadi di beberapa titik lokasi di Sukoharjo dimana dengan ditandainya macetnya beberapa selokan ketika terjadi hujan yang tidak begitu deras akan tetapi genangan air menimbulkan titik-titik rawan banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang maupun deras, Contoh di daerah Pucangan.
5. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terbukti masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai tempatnya. Penumpukan sampah liar di beberapa titik ilegal, contoh di daerah jalan raya menuju Sukoharjo terkhusus daerah Jombor.

6. Banyaknya kegiatan usaha yang belum mempunyai kelengkapan perijinan, terutama usaha kecil. Contoh kegiatan usaha rumah pemotongan ayam di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura.
7. Banyaknya pelaksana kegiatan industri yang belum memenuhi ketentuan. Contoh industri pakan ternak di Desa Plesan, Kecamatan Nguter.
8. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki keterbatasan Kelembagaan/Institusi Pengawas Lingkungan Hidup ditingkat masyarakat.
9. Sumber Daya Manusia dibidang lingkungan hidup, masih perlu ditingkatkan baik mutu maupun kuantitasnya.
10. Dari permasalahan yang ada di atas yang menjadi isu utama pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair dan udara.

C. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang bertempat di Jl. Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo. Di dalam dinas lingkungan hidup terdapat beberapa bidang terkait wewenang dan tugasnya sebagai petugas lingkungan hidup. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, bidang penegakan hukum lingkungan hidup, dan bidang peningkatan kapasitas. Adapun

beberapa bidang lainnya yang mengurus kewajiban-kewajibannya tersendiri dalam urusan dinas lingkungan hidup. Bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai tugas menerima laporan/aduan perihal tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dalam pelaporan ini ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan aduan tersebut. Bidang penegakan hukum mempunyai tugas melakukan penataan perihal undang undang/aturan-aturan yang berlaku, memberikan sanksi administrasi kepada pelaku tindak pencemaran lingkungan hidup dan melakukan tindakan tangkap tangan yang dilaksanakan PPNS-BLHD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya badan lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo memiliki strategi pengembangan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan hidupn secara terpadu terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi : sumber daya manusia, sumber daya hayati dan Non-hayati, serta sumber daya buatan untuk melestarikan lingkungan hidup yang lebih dinamis. Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi : upaya penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama

sumber daya alam hayati dan non-hayati sebagai unsur lingkungan hidup.

Kebijakan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.
2. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
3. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk mencegah dan menghindari penggunaan lahan produktif dan pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem secara keseluruhan.

Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD provinsi yaitu⁴:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Pengkoordinasian dalam menyusun program , pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas daerah kabupaten, dan daerah kota.

⁴ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 tahun 2004

3. Pengkoordinasian dalam menyusun program , pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor.
4. Fasilitas Daerah Kabupaten dan Daerah kota dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
5. Fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang lingkungan hidup.
7. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup
8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Adapun wewenang PPNS-LH berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UUPH, yaitu⁵ :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan .
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan&Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 88.

5. Melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan catatan, dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Menghentikan penyidikan.
9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
10. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan /atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
11. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Wewenang PPNSLH sebagaimana yang dimaksud dalam PERDA adalah⁶:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
5. Melakukan penyitaan benda dan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil penyelenggaraan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
10. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
11. Apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan polisi untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dari/ atau pengadilan

Dalam Dinas Lingkungan Hidup terdapat Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kebijakan tentang tata cara pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun di pengadilan

dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat. Dan Seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kebijakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang meliputi izin lingkungan dan izin pemberian penghargaan lingkungan hidup, pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup, pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup daerah, penyidikan perkara pelanggaran hukum dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Dalam undang undang tentang pembentukan susunan perangkat daerah nomor 12 tahun 2016, dinas lingkungan hidup memiliki tanggung jawab baru perihal pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan sampah yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sekarang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada akhirnya Dinas Lingkungan Hidup membentuk bidang manajemen persampahan/unit pengelolaan terpadu. Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya diharuskan membuat laporan tahunan tentang keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo.

Dinas lingkungan hidup kabupaten Sukoharjo sedang merintis proper kabupaten. Terdapat empat perusahaan yang penilaian proper dinilai langsung dengan proper nasional di Kabupaten Sukoharjo yaitu PT. Sritex, PT. Dan liris, PT. Typontex dan PT. Konimex.⁷ Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Sukoharjo berasal dari masyarakat, industri dan pemukiman. Sampah yang di hasilkan oleh masyarakat dalam kegiatan rumah tangga merupakan sumbangsih

⁷ Didik, Pegawai DLH Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2017, jam 09.00-10.00 WIB

permasalahan paling parah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini dinas melakukan upaya pengelolaan limbah untuk di kelola masyarakat. Pemberian bantuan berupa IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) mulai diberlakukan bagi masyarakat pemukiman padat di lingkungan Sukoharjo. Pengelolaan dilaksanakan oleh setiap RW, pelarang pembuatan sapitank dalam pemukiman padat adalah salah satu pencegahan yang diakukan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan limbah. Setiap rukun warga diharuskan turut andil dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. pembuatan sapitenk terpadu bagi masyarakat lingkungan padat merupakan upaya pemerintah dalm menangani permasalahan pencemaran tanah. Indutri yang menghasilkan limbah maupun perusahaan melakukan kegiatan dan menghasilkan limbah, dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan atau strandat yanng telah ditentukan oleh pemerintah. Limbah yang diperoleh dari pemupukan masyarakat dalam bidang pertanian yang berlebihan juga menghasilkan limbah yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.⁸

D. Prosedur Pemberian dan Pelaksanaan Sanksi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan :setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pelestarian

⁸ Ali, Pegawai DLH Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2017, jam 09.00-10.00 WIB

lingkungan hidup kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan. Instansi yang bertanggung jawab dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara international dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* . penyelesaian sengketa lingkungan , terutama berkaitan dengan ganti rugi, lebih banyak dilakukan diluar pengadilan, karena hambatan dalam kasus kasus lingkungan adalah dalam hal pembuktian, di mana proses penyelesaian sengketa di pengadilan , khususnya di indonesia dengan penerapan sistem *common law* sangat kaku dan formalistik.⁹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan abritase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan. Pemerintah daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Selama ini Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo melakukan beberapa tindakan terkait tindak pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan surat peringatan. Tindak pencemaran yang dilaporkan umumnya diperoleh dari aduan masyarakat sekitar lingkungan yang mendapat imbas dari pencemaran lingkungan hidup yang terjadi.

⁹ Marhaeni ria siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta:PT. gramedia pustaka utama, 2012), h. 111.

Tata cara pengenaan sanksi administrasi, pencabutan izin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran.
2. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran.
3. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran.
4. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin disertai alasan yang jelas dan wajar.
2. Pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan.

3. Pemberian izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.

Pengenaan sanksi pidana dapat diberikan sebagai alternatif terakhir terhadap pelanggaran yang barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat. Diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam dengan pidana paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IV
ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN PRESFEKTIF PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN
2013 KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup kabupaten sukoharjo selama ini belum memberikan sanksi tegas terhadap tindak pencemaran lingkungan hidup adapun sanksi yang di berlakukan hanya sanksi administrasi ringan. Bidang penegakan hukum bertugas dalam memberikan perizinan lingkungan hidup dalam perihal pembuangan limbah cair dan tempat sementara limbah berbahaya, berbau dan beracun bagi pelaku industri yang menghasilkan limbah tersebut. Tugas dalam penilaian proper bagi perusahaan juga dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup tidak saja memberikan nilai akan tetapi juga memberikan pembinaan dan pengawasan dalam lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan limbah.

Dalam perihal lingkungan hidup dinas lingkungan hidup selalu memperoleh aduan dari masyarakat terkait tindak pencemaran yang merugikan masyarakat. Sampah yang paling sering menimbulkan permasalahan di masyarakat adalah sampah dari industri. sampah dari peternakan dan tempat penumpukan sampah ilegal yang memcemari lingkungan sekitar meskipun sudah ada perda yang mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya.

Pengaduan tindak pencemaran di lingkungan Kabupaten Sukoharjo tidak sepenuhnya menjadi wewenang dinas lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo, ada pengecualian terhadap perusahaan yang memiliki hak izin pengolahan limbah

B3 yang diterbitkan oleh pihak provinsi maka pelaporan tersebut yang berhak menindak lanjuti adalah dinas lingkungan hidup provinsi. Beberapa perusahaan yang izin UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) nya diterbitkan oleh provinsi, yaitu yang bergerak dalam bidang pengambilan air bawah tanah, tanah urug, dan pabrik pengolahan limbah B3.¹

Dinas lingkungan hidup memberikan bantuan IPAL (Instalasi pengelolaan air limbah) bagi industri tahu tempe dan perajin *ethanol* untuk pengelolaan limbah sehingga menghasilkan *blue gas*. Pembinaan dilakukan dinas lingkungan hidup dan melakukan pendekatan dalam upaya penyadaran masyarakat terkait tindak pencemaran lingkungan hidup. dinas lingkungan hidup belum bisa memberikan sanksi terhadap tindak pencemaran yang dilakukan masyarakat, upaya pembinaan yang dilakukan dinas lingkungan hidup lebih diutamakan dalam hal pencemaran lingkungan. Sampah yang dihasilkan masyarakat didominasi oleh sampah organik yang di mana seharusnya masyarakat dapat mengelolanya secara mandiri dengan adanya bank sampah yang di laksanakan oleh penggiat lingkungan di lingkungan masyarakat masing masing kiranya dapat membantu penyelesaian masalah sampah di masyarakat. Bank sampah yang di lakukan di Desa Ngadirejo kecamatan Kartasura oleh mas Sarijo patut dikembangkan, selain memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah kiranya dapat juga menjadi tujuan wisata edukatif lingkungan hidup. TPA yang dulunya memiliki kepanjangan tempat pembuangan akhir kini dirubah menjadi tempat pemrosesan akhir dengan

¹ *Ibid*

tujuan sampah dikelola diproses sehingga bermanfaat dan tidak menjadi permasalahan di masyarakat.²

Industri yang menghasilkan limbah dan tidak dikelola dengan baik akan memperoleh penilaian proper yang jelek atau memperoleh raport merah yang diterbitkan oleh provinsi. Pada akhirnya industri itu akan kehilangan pelanggan terutama dari luar negeri dikarenakan konsumen tidak merespon baik produk dari industri yang tidak memiliki konsen terhadap lingkungan. Dalam hal ini industri/perusahaan diwajibkan memberikan laporan perihal pengelolaan limbah dalam jangka waktu per-semester (6 bulan), laporan tentang pengelolaan limbah cair setiap bulan dan keadaan udara dalam setiap pelaporannya apakah sudah sesuai dengan baku mutu yang telah dibatasi. Jika ditemukan permasalahan maka dinas lingkungan hidup memberikan pembinaan dan pengawasan, di Sukoharjo terdapat kurang lebih 500 perusahaan besar maupun kecil. Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan di Sukoharjo sudah harus memiliki izin dan melaksanakan kegiatan sesuai RPL(rencana pengelolaan limbah) yang telah mereka buat sebelumnya. Terkait pengelolaan limbah Kabupaten Sukoharjo memiliki Komisi Penilaian AMDAL, dan bagi industri kecil yang hendak melaksanakan kegiatan harus mempunyai UPL/UKL yang telah diatur oleh pemerintah setempat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ialah salah satu upaya penegakan hukum lingkungan di lingkungan kabupaten Sukoharjo. Peningkatan edukasi dan pembinaan lingkungan juga dilakukan oleh dinas

²Harjanti, Pegawai DLH Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2017, jam 09.00-10.00 WIB

lingkungan hidup Sukoharjo dalam upaya membentuk kader lingkungan yang menarget anak sekolah mulai dari SD,SMP, dan SMA sebagai wujud membentuk sekolah yang peduli dengan lingkungan (pembinaan siswa adiwiyata). Membentuk karakter siswa yang memiliki budaya lingkungan, gemar menanam dalam arti lain siswa tahu pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup yang berkualitas dengan cara membuang sampah pada tempatnya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Siswa yang gemar menjaga lingkungannya tetap asri dengan gemar menanam pepohonan sebagai pemenuhan kebutuhan udara yang sejuk.³

Penegakan peraturan tentang lingkungan hidup seharusnya menjadi kebutuhan seluruh masyarakat indonesia, bagi warga sipil maupun pegawai yang diberi amanat dalam upaya palaksanaan peraturan yang telah di bentuk. peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam palaksaan penegakan peraturan yang telah di setuju oleh pemerintahan daerah tersebut dan dinas-dinas terkait yang dapat menunjang berlakunya peraturan. Dalam hal lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa wewenang khusus terkait penindakan terhadap para pelanggar.

B. Tinjauan Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo

Prosedur pemberian sanksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terhadap perusahaan yang melanggar dengan cara memberikan surat peringatan pertama. Jika surat peringatan pertama tidak diindahkan terbit surat peringatan kedua, surat peringatan kedua tidak mendapatkan respon yang baik dari perusahaan dan tetap melakukan pelanggaran

³ *Ibid*

maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin perusahaan. Bilamana perusahaan tetap melakukan pelanggaran maka dinas lingkungan hidup akan mencabut izin AMDAL perusahaan yang artinya perusahaan dilarang melakukan kegiatan operasional yang artinya perusahaan ditutup.

Prosedur pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya sesuai peraturan daerah yang berlaku. Keterbatasan wewenang yang tidak sepenuhnya dimiliki dinas terkadang menjadi suatu permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Pemberian sanksi terhadap pelanggar terkait perda UUPH masih belum terlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan permasalahan yang ditangani masih mencakup perusahaan dan industri terkait. Para pelanggar yang membuang sampah dan limbah skala kecil akan tetapi sangat meresahkan masyarakat belum mendapat perhatian lebih dari dinas dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dinas sebagaimana yang disampaikan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana semua tindakan yang dilarang dalam ketentuan peraturan daerah tertera pada pasal 61 yang berbunyi, pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 tidak membebaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Keterangan mengenai tindak pidana terkait pelanggaran peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertera pada beberapa salah satunya terdapat pasal 56 terkait larangan ,yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Membuang air limbah ke media lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
5. Melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah B3 dan produk olahan atau usaha kegiatan baik padat maupun cair tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
6. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
7. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
8. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
9. Melakukan penebangan secara liar, perubahan perusakan kawasan hutan serta ruang terbuka hijau yang ditetapkan daerah sebagai kawasan penyangga kelestarian sumber daya alam.
10. Melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dan persawahan dengan menggunakan racun, stroom listrik dan bahan peledak.

11. Melakukan pemanfaatan, perubahan dan kerusakan pada kawasan sumber air dan kawasan yang menjadi penyangga sumber air.
12. Melakukan perburuan, pemeliharaan atau penangkaran, perdagangan dan mengkonsumsi binatang atau satwa langka yang keberadaannya termasuk jenis satwa yang dilindungi tanpa seizin pejabat yang berwenang.

Masalah kepatuhan hukum dan ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih besar, yaitu kesadaran hukum dan disamping masalah kepatuhan dan ketaatan kesadaran hukum tersebut termasuk menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Efektifitas hukum berakitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut⁴:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai –nilai yang berlaku artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena komplain, identitas, rasa kebangsaan, dan kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu yang di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan, dan diharapkan pemberian hasil.

⁴ Soerjono soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), h. 55.

Landasan hukum telah tersedia sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini yang diperlukan adalah kemauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk sungguh sungguh menjalankan amanat undang-undang tersebut.⁵Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lingkungan terkait penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai mana mestinya perundang-undangan dibentuk untuk dilaksanakan bukan sekedar menjadi halaman-halaman yang akan dibuka ketika permasalahan muncul, peristiwa tersebut semestinya bisa dicegah jika aparatur pemerintah menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait. Pada hakikatnya masyarakat mempercayakan negara kepada para aparatur negara yang telah diberi wewenang terkait hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bangsa atau masyarakat. Terkait hal yang bersifat sistematis tentunya masyarakat lebih banyak menunggu kebijakan-kebijakan pemerintahan yang semestinya berpihak kepada kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan kebijakan atas kepentingan golongan tertentu yang akibatnya akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.(Jakarta: PT. gramedia pustaka utama, 2012), h. 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan sanksi dalam peraturan daerah yang berlaku melalui beberapa tahapan antara lain: pelaporan, pemeriksaan laporan, pengumpulan fakta/bukti yang ada, dan jika terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama, jika surat peringatan pertama tidak cukup maka akan diterbitkan surat peringatan kedua. Apabila tetap terjadi pelanggaran maka akan terbit surat peringatan ketiga yang berarti mengharuskan pemberhentian operasional usaha.
2. Mekanisme pelaksanaan sanksi yang dilakukan dinas lingkungan hidup belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sanksi administratif ringan yang diberlakukan belum membuktikan keseriusan dinas lingkungan hidup dalam penanganan kasus pencemaran. Tidak ada surat peringatan kedua maupun ketiga yang diterbitkan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten sukoharjo dalam upaya menangani tindak pencemaran yang terus terjadi dan semakin parah. Upaya penegakan hukum lingkungan menggunakan sanksi administrasi saja belum cukup kiranya membuat jera pelaku tindak pencemaran terutama perusahaan-perusahaan besar. Sanksi Pidana denda yang tertera dalam perda berupa uang senilai Rp.50.000.000,- tidak membuat perusahaan takut, dikarenakan biaya pengelolaan limbah lebih besar dari pada denda yang diberlakukan.

B. Saran Saran

1. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, dinas lingkungan hidup semestinya bertindak dengan tegas terkait pelaksanaan sanksi administratif dengan menerbitkan surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga sebagai bukti keseriusan dan ketegasan dalam menangani para pelaku pencemar lingkungan hidup.
2. Dalam hal perizinan AMDAL perlu dikaji lebih dalam dimana faktanya banyak pelaku usaha tidak mempedulikan tentang bagaimana kemudian pengolahan hasil limbah akhir yang sudah tidak dapat dipakai. Pada umumnya akhirnya dibuang disembarang tempat seperti : irigasi ,selokan pembuangan dan tempat penimbunan sampah sementara yang akhirnya akan menumpuk dalam satu tempat pemrosesan akhir, yang disana penanganan untuk saat sekarang belum memiliki solusi yang konkrit. Mungkin saat ini sudah menimbulkan permasalahan bagi masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir.
3. Tindakan tangkap tangan kiranya perlu dilakukan untuk upaya penegakan peraturan daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana itu berlaku dalam upaya penegakan peraturan daerah lainnya, semisal penangkapan terhadap pengedar rokok tanpa bea cukai. Tindakan tangkap tangan bagi pembuang sampah sembarangan, sudah ada beberapa daerah yang memberlakukanya semisal daerah Kabupaten Karanganyar dengan memberikan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

4. Peran serta berbagai elemen masyarakat dari akademisi maupun praktisi kirannya lebih di ikut sertakan dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup. banyak komunitas/penggiat lingkungan hidup di Sukoharjo di luar LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang lingkungan hidup, memungkinkan upaya percepatan upaya penanganan tentang lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Mudofir, *Masail Al-fiqhiyyah Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999.
- Hasyim Dardiri, *Hukum Lingkungan*. Surakarta: sebelas maret university press, 2004.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- M. Thalhah, Mufid Achmad, *Fiqih Ekologi menjaga Bumi memahami makna Kitab Suci*. Yogyakarta: total media, 2008.
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2008.
- Siombo Ria Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Soekanto Soerjodono, Chalimah suyarto, Hartoono widodo, *Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit universitas indonesia, 2012.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulistia Teguh, Zurnetti Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013.

Perundang-undangan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 42 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 148 tahun 2004
- Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kab. Sukoharjo tahun 2015

lingkungan hidup Kab. Sukoharjo

Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 Kabupaten Sukoharjo tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda no 6 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009

HTTP

<http://digilib.unila.ac.id/21334/>

<http://lib.unnes.ac.id/18060/1/8150408167.pdf>,

<https://digilibuns.ac.id/dokumen/detail/230>

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dwonload/24004/NTA1Nj>



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./Fax. (0271) 590244

Website: www.dinaspmptsp.sukoharjokab.go.id Email: dinaspmptsp@sukoharjokab.go.id dinaspmptsp@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN BARU

NOMOR: 503/PEN/125/III/2017

TENTANG

EFEKTIFITAS SANKSI PADA PERDA UUPH DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI SUKOHARJO

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
6. Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dari Dekan Fak.Syariah IAIN Surakarta. No: B-241/In.10/DB/PP.00.9/03/2017 Tanggal 29 Maret 2017.

MENGIZINKAN:

Kepada :
Nama : MOHAMMAD FIJAR RAHMANTO
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Surakarta Fak.Syariah.Nim : 122111020
Alamat : DS.SUMBERARUM RT/RW:018/006 Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro
Penanggung Jawab : Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag
Selaku : Dekan
Alamat : Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
Untuk : Permohonan Ijin Penelitian
Obyek Lokasi : Dinas LH Kabupaten Sukoharjo

Surat Izin Penelitian ini berlaku dari 29 Maret 2017 s.d 28 Juni 2017.

Dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/ lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Penelitian/ survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan masyarakat/ pemerintah;
3. Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pemegang surat ini tidak menaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku/ pertimbangan lain.
4. Setelah penelitian/ survei selesai, supaya menyerahkan copy hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 05 April 2017

KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo
 2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo
 3. Kepala Dinas LH Kabupaten Sukoharjo
- Camat Gatak



AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, MH

Pedoman Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten SUKOHARJO

Identitas Informan 2

Nama :

Jabatan :

1. Apakah saudara mengetahui tentang terjadinya pencemaran di sukoharjo?dimana tepatnya?apa penyebabnya?
2. Seberapa jauh kegelisahan masyarakat akan masalah pencemaran akibat sampah di sukoharjo?
3. Faktor mendasar yang membuat tindak pencemaran terjadi?kenapa?
4. Sampah apa yang paling dominan di sukoharjo yang andil dalam pencemaran lingkungan di sukoharjo?dan kenapa?
5. Apakah sudah terjadi bencana alam akibat pencemaran lingkungan di sukoharjo?kalau ada apa saja? Dan dimana?
6. Apakah bapak mengetahui sanksi-sanksi bagi tindak pencemar lingkungan dalam perda no.8 Kabupaten Sukoharjo?sebutkan?
7. Sejauh mana pengaruh sanksi perda no.8 kabupaten sukoharjo pada masyarakat?dan apakah efektif?
8. Upaya apa yang dilakukan dinas lingkungan hidup untuk pencegahan terjadinya tindak pidana pencemaran?
9. Upaya apa yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten sukoharjo terhadap perusahaan yang melakukan tindak pencemaran (pasca kejadian)?
10. Instansi mana saja yang memiliki wewenang dalam upaya penegakan hukum terkait perda no.8 tahun 2010 kabupaten sukoharjo?
11. Apakah ada masyarakat yang ikut andil dalam upaya penegakan hukum terkait perda no.8 tahun 2010 kabupaten Sukoharjo?
12. Berapa jummlah LSM lingkungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo?apa pengaruh LSM ?

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
- b. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Sukoharjo berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa terjadinya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 194);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

31. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
32. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
36. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
37. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
38. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
39. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang terlibat dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi daerah; dan
- o. Kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global, nasional, regional dan lokal.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - a.inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c.penyusunan RPPLH.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan RPPLH daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi; dan
 - b. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Bupati.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

- b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ekoregion di wilayah daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo beserta rencana rincinya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan daerah, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan daerah, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 13

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 14

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 6 Amdal

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 21

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Pasal 23

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Penilai Amdal Daerah wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (3) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan rekomendasi Gubernur.

- (4) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (6) Tim Teknis dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Paragraf 7

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu fasilitasi penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 **Perizinan**

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Bupati wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 32

- (1) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Lingkungan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 36

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi;
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 38

Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 39

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Audit lingkungan hidup diwajibkan kepada :
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 46

Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 di daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 48

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 49

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 51

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di daerah;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kebijakan daerah mengenai tata cara pengakuan keberadaan komunitas masyarakat peduli lingkungan;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- o. menerbitkan Izin Lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 52

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 53

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 54

Setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 55

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 56

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. membuang air limbah ke media lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- e. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah B3 dan/atau produk olahan atau usaha dan/atau kegiatan baik padat maupun cair tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
- g. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- i. melakukan penebangan secara liar, perubahan, perusakan kawasan hutan serta ruang terbuka hijau yang ditetapkan Daerah sebagai kawasan penyangga kelestarian sumber daya alam;
- j. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dan persawahan dengan menggunakan racun, stroom listrik dan bahan peledak;
- k. melakukan pemanfaatan, perubahan dan perusakan pada kawasan sumber air dan kawasan yang menjadi penyangga sumber air; dan
- l. melakukan perburuan, pemeliharaan atau penangkaran, perdagangan

dan/atau mengkonsumsi binatang atau satwa langka yang keberadaannya termasuk jenis satwa yang dilindungi tanpa seizin Pejabat yang berwenang.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga nilai-nilai, budaya dan kearifan lokal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tata cara kerja pejabat pengawasan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 61

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 62

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 63

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 - d. perintah pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 64

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 68

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 70

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 71

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 72

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 73

Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7 Gugatan Administratif

Pasal 76

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 77

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 79

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 56 huruf a sampai dengan huruf h diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf i sampai dengan huruf l diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 6



Pembuangan sampah ilegal daerah jombor, bentuk pelanggaran lingkungan



Proses wawancara dengan pegawai DLH



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

Sukoharjo, April 2017

Nomor : 660.1/ /IV/2017 Yth.: Kepada
Lampiran : - Ibu Indriani Widyastuti
Perihal : Jawaban aduan Pemilik Peternakan Bebek
di
Desa Sanggung

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Sanggung Kecamatan Gatak Nomor 144/37/IV/2017 perihal Aduan Pencemaran terhadap adanya dugaan pencemaran dari peternakan bebek di Desa RT 01 RW 03 Sanggung dan home industri pembuatan tahu di Desa Sanggung RT 04 RW 03.

Berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, bersama ini kami sampaikan hasil temuan kondisi di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Home industri pembuatan tahu sudah tidak memproduksi lagi karena pindah lokasi yang baru;
2. Terdapat bau yang sangat menyengat dari peternakan bebek;
3. Sudah ada usaha dari peternak bebek untuk mengurangi bau yang tidak menyengat dari peternakan bebek tersebut;
4. Tempat ternak bebek terlihat sangat kotor;
5. Jumlah ternak bebek sekitar 1.300 ekor.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami minta saudara :

1. Untuk berkonsultasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo khususnya Bidang Peternakan cara beternak bebek yang benar dan sehat;
2. Memperbaiki tempat beternak bebek dan menghilangkan bau yang menyengat dari peternakan bebek.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO SUTARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581030 198603 1 007

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Desa Sanggung.
2. Camat Gatak.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

Sukoharjo, Pebruari 2017

Nomor	:	660.1/	/II/2017	Yth.:	Kepada
Lampiran	:	-			Kepala Desa Pabelan, Kec Kartasura
Perihal	:	Pembuatan Septiktank		di	<u>SUKOHARJO</u>
		warga			

Menindaklanjuti aduan secara lesan yang diajukan oleh Bapak Sunoto selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Fraksi Partai Amanat Nasional) terhadap adanya dugaan pencemaran Sungai di Mendungan akibat pembuatan limbah tinja dari kakus warga langsung ke sungai.

Berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 di Sungai di Dukuh Mendungan, Desa Pabelan Kecamatan Kartasura, bersama ini kami sampaikan hasil temuan kondisi di lapangan antara lain sebagai berikut:

6. Saluran pembuangan air limbah domestik ke sungai sebagian besar berasal dari limbah mencuci dan mandi dari sebagian warga dukuh mendungan;
7. Ada beberapa pipa pralon warga mendungan yang merupakan pembuangan langsung tinja dari kakus ke sungai;
8. Berdasarkan informasi warga sekitar dari Kelurahan Karang asem sampah yang dibuang ke sungai merupakan sampah dari warga yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dan langsung melempar sampahnya ke sungai.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, kami minta saudara untuk :

3. memerintahkan warga disekitar sungai di Dukuh Mendungan agar membuat Septiktank tinja yang kedap air dan kemudian bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo untuk pengambilan limbah tinja untuk diolah di Instalansi Pengolah Limbah Tinja.
4. Melakukan pengawasan agar warga tidak membuang sampah ke Sungai.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO SUTARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581030 198603 1 007

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Sunoto (penyampai aduan).
2. Camat Kartasura.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

Sukoharjo, Pebruari 2017

Nomor : 660.1/ /II/2017
Lampiran : -
Perihal : Larangan Membuang
Limbah ke Sungai

Kepada
Yth.: Pemilik Usaha Pemotongan Ayam Murni
di Desa Makam Haji Kecamatan
Kartasura
di
Makam haji

Menindaklanjuti aduan tertulis warga ... terhadap adanya dugaan pencemaran Sungai di Makam haji akibat usaha Pemotongan Ayam Murni.

Berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 di Sungai Desa Makam haji, Kecamatan Kartasura, bersama ini kami sampaikan hasil temuan kondisi di lapangan antara lain sebagai berikut:

9. pembuangan air yang masih bercampur darah dan bulu-bulu kecil sisa kotoran pemotongan ayam sehingga air yang masuk ke sungai agak merah dan agak kotor;
10. Di pemotongan sudah ada IPAL, tetapi penolahan limbah belum maksimal;
11. Pemotongan ayam jika dirata-rata setiap harinya kurang lebih 300 (tiga ratus) ekor.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL, kami minta saudara untuk :

5. Menghentikan pembuangan limbah pemotongan ayam ke sungai.
6. Membuat Izin Lingkungan (dokumen UKL-UPL).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO SUTARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581030 198603 1 007

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Desa Makam haji.
2. Camat Kartasura.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

Sukoharjo, Desember 2016

Nomor : 660.1/ /XII/2016 Yth.: Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Saudara Pimpinan CV. Indo Bulu Mandiri
Perihal : Teguran I di – SUKOHARJO

Berdasarkan monitoring dan pengawasan yang dilakukan Tim Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 di industri/pabrik pakan ternak CV. Indo Bulu Mandiri di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, bersama ini kami sampaikan hasil temuan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan industri/pabrik pakan ternak CV. Indo Bulu Mandiri antara lain sebagai berikut:

1. Proses produksi masih berlangsung.
2. Penanganan timbulnya dampak lingkungan hidup masih belum optimal/signifikan, antara lain:
 - a. Masih timbul bau yang menyengat (bau tidak enak) baik didalam pabrik maupun diluar pabrik.
 - b. Pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum selesai sepenuhnya.
 - c. Penggunaan bahan bakar batubara yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa limbah abu batubara, masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Bangunan pabrik masih bersifat semi permanen.
3. Hasil kesepakatan rapat mediasi di kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 28 Nopember 2016, belum dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami minta saudara untuk:

1. Melaksanakan dengan sepenuhnya hasil kesepakatan rapat mediasi yang diselenggarakan di kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 28 Nopember 2016 (hasil kesepakatan terlampir).
2. Melakukan penanganan timbulnya dampak lingkungan hidup secara lebih optimal/signifikan.
3. Menghentikan kegiatan produksi terlebih dahulu, sampai terpenuhinya hasil kesepakatan rapat mediasi dan tertanganinya dampak lingkungan hidup secara lebih optimal/signifikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

Ir. ACHMAD HUFRONI, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 195811201991031004

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sukoharjo sebagai laporan;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter;
4. Kepala Desa Plesan;
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

Sukoharjo, Januari 2017

Nomor : 660.1/ /I/2017 Yth.: Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Saudara Pimpinan CV. Indo Bulu Mandiri
Perihal : Teguran II di
SUKOHARJO

Berdasarkan monitoring dan pengawasan yang dilakukan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di industri/pabrik pakan ternak CV. Indo Bulu Mandiri di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, bersama ini kami sampaikan hasil temuan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan industri/pabrik pakan ternak CV. Indo Bulu Mandiri antara lain sebagai berikut:

1. Proses produksi masih berlangsung.
2. Penanganan timbulnya dampak lingkungan hidup masih belum optimal/signifikan, antara lain:
 - a. Masih timbul bau yang menyengat (bau tidak enak) baik didalam pabrik maupun diluar pabrik.
 - b. Pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum selesai sepenuhnya.
 - c. Penggunaan bahan bakar batubara yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa limbah abu batubara, masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Bangunan pabrik masih bersifat semi permanen.
3. Surat Teguran I Nomor 660.1/1538/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tidak dilaksanakan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami minta saudara untuk:

1. Melaksanakan dengan sepenuhnya Surat Teguran I Nomor 660.1/1538/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 (Teguran I sebagaimana terlampir).
2. Melakukan penanganan timbulnya dampak lingkungan hidup secara lebih optimal/signifikan.
3. Menghentikan kegiatan produksi.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO SUTARTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19581030 198603 1 007

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sukoharjo sebagai laporan;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter;
4. Kepala Desa Plesan.